

# DAMPAK PEMBIAYAAN LKMS Berdasarkan Garis Kemiskinan



**Dr Rofiqoh Ferawati**  
Alumnus S3 PWD IPB dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN STS Jambi

**K**emiskinan merupakan persoalan mendasar dan global yang menjadi pusat perhatian pemerintah dan merupakan masalah bagi semua negara. Di Indonesia perkembangan kemiskinan selama sepuluh tahun mengindikasikan kecenderungan penurunan, namun persentase penurunan tersebut semakin kecil setiap tahunnya. Kemiskinan di Indonesia diukur oleh BPS dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan di Indonesia diwujudkan dalam bentuk besarnya nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak (BPS, 2011).

Jika seseorang memiliki pengasilan (konsumsi) tiap bulan dibawah garis kemiskinan tersebut, maka dianggap miskin. Garis kemiskinan Indonesia tahun 2012 untuk kota yaitu Rp. 277.382 perkapita perbulan dan desa Rp. 240.441 perkapita perbulan. Jika seseorang memiliki pengasilan (konsumsi) tiap bulan dibawah garis kemiskinan tersebut, maka dianggap miskin.

Sedangkan, menurut *World Bank* konsep kemiskinan adalah kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan. Secara absolut seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi dapat diproksi dari kemiskinan.

Bank Dunia menggunakan dua ukuran garis kemiskinan yaitu pendapatan USD 1 dan USD 2 perkapita perhari. Penelitian ini tidak menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS, namun menggunakan garis kemiskinan bank dunia USD 2.

Selain BPS dan *World Bank*, kategori kemiskinan juga ada berdasarkan syariah Islam. Standar kemiskinan menurut syariah Islam, memiliki dua pendekatan penghitungan kemiskinan yakni menggunakan had al kifayah dan menggunakan garis nishab zakat (Beik, 2007). Standar had al kifayah merupakan parameter standar kemiskinan yang telah diterapkan di Malaysia.

Penilaian yang dibuat dalam menentukan had al kifayah ini merangkum lima faktor yaitu agama, kekayaan, akal, keturunan dan diri/jiwa. Pendekatan yang kedua dalam menentukan standar kemiskinan dalam Islam adalah dengan menggunakan nishab zakat, yang menjadi parameter penetapan status seseorang apakah dikategorikan sebagai muzakki (wajib zakat) atau mustahik (penerima zakat).

Ada dua opsi penghitungan nishab zakat. Pertama menggunakan nishab emas dan perak dan yang kedua menggunakan nishab zakat pertanian. Jika nishab zakat emas perak maka garis kemiskinan angkanya perbulan perkapita adalah Rp. 782.200 dengan asumsi harga emas Rp. 520.000, dengan anggota keluarga per rumah tangga rata-rata 4.7 orang (Beik, 2007). Dari ketiga standar yang digunakan, standar kemiskinan

BPS untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sebagai syarat minimal untuk usaha kurang logis.

Untuk mengurangi kemiskinan maka pemerintah diharapkan segera mengambil peran dan langkah strategis untuk mengajak masyarakat mengembangkan jiwa entrepreneurship dan penguatan entrepreneur.

Berdasarkan pendapat Mc Clelland dan perbandingan dengan negara-negara tetangga bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah masih minimnya jumlah pengusaha/entrepreneur.

Pengembangan jumlah entrepreneur ini dapat dilakukan melalui peningkatan usaha-usaha berskala mikro. Sektor usaha mikro terbukti memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis dibandingkan sektor lain. Terjadinya krisis ekonomi memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang bias kepada usaha skala besar justru tidak tepat sasaran khususnya dalam upaya pemerataan kesejahteraan



FOTO RAISAN AL FARISI



GAMBAR 1 KATEGORI PENDAPATAN USAHA BERDASARKAN GARIS KEMISKINAN

masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor, karena kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan angka kemiskinan dan pengangguran merupakan jumlah terbesar di wilayah Jawa Barat. Data BPS menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 persentase penurunan penduduk miskin Kabupaten Bogor berturut-turut meski setelah 2008 persentase penduduk miskin mengalami penurunan meski secara keseluruhan penurunan tersebut masih kecil, yaitu 10.12 persen pada tahun 2013.

Namun kabupaten Bogor juga merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan usaha mikro. Penelitian ini membandingkan peluang terjadinya pengurangan kemiskinan dengan menggunakan GK World Bank dengan GK syariah Islam.

Pada penelitian ini karena survei di tahun 2014 maka diasumsikan 1 dollar adalah 10.000 rupiah. Standar bank dunia USD 2 perhari perorang maka jika diasumsikan rupiah sepuluh ribu sehingga menjadi Rp.600.000/orang/bulan. Sedangkan GK Syariah Islam penghitungan berdasarkan nishab zakat emas perak yaitu Rp. 782.200 perbulan/perkapita.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 100 usaha mikro yang mendapat pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan menggunakan GK bank dunia dan GK Syariah Islam terlihat bahwa rata-rata pendapatan per-

Hasil riset penulis memperlihatkan perbandingan perhitungan dengan menggunakan kategori kedua GK, menunjukkan bahwa GK Syariah Islam membuat jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan GK World Bank.

kapita usaha mikro yang mendapat pembiayaan masih berada di bawah garis kemiskinan yaitu Rp. 550.000 perkapita perbulan atau berada pada kisaran USD 1.8 perkapita perhari.

Berdasarkan standar GK World Bank maka pelaku usaha mikro yang pendapattannya masuk kategori tidak miskin sebanyak 55 responden dan yang masuk kategori miskin sebanyak 45 responden. Sedangkan berdasarkan GK Syariah Islam pelaku usaha mikro yang pendapattannya masuk kategori tidak miskin sebanyak 25 responden dan yang masuk

kategori miskin sebanyak 75 responden.

Berdasarkan hasil olahan logit biner dengan menggunakan GK World Bank menunjukkan besaran pembiayaan yang didapat dari LKMS berpengaruh sebesar 0.33 yang artinya semakin besar pembiayaan yang didapat maka semakin besar pengaruhnya untuk menjadi tidak miskin.

Nilai Odds Ratio (menunjukkan besarnya peluang) besarnya pembiayaan yang didapat pelaku usaha mikro dari LKMS sebesar 1.365, artinya semakin besar pembiayaan yang didapat pelaku usaha maka peluang untuk menjadi tidak miskin sebesar 1.365 kali lipat.

Hasil riset penulis memperlihatkan perbandingan perhitungan dengan menggunakan kategori kedua GK, menunjukkan bahwa GK Syariah Islam membuat jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan dengan GK World Bank. Namun pengaruh pengurangan kemiskinan lebih besar dengan menggunakan GK Syariah Islam.

Selain itu peluang usaha mikro untuk menjadi tidak miskin lebih besar 2 kali lipat dengan menggunakan perhitungan GK Syariah Islam dibandingkan dengan GK World Bank yang hanya sebesar 1 kali lipat. Karena itu, tidak ada salahnya jika Indonesia mulai menggunakan perhitungan angka kemiskinan dengan menggunakan GK Syariah Islam sebagai data pembandingan yang lebih sesuai. *Wallaahu a'lam.*

## TSAQOFI

### Sarajevo dan Wakaf Produktif



**Dr Irfan Syaqui Beik**  
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Pada tanggal 10-15 November 2015 lalu penulis berkesempatan untuk memenuhi undangan Badan Zakat Bosnia dan Herzegovina sebagai pembicara dalam suatu seminar tentang zakat dan keuangan sosial Islam. Dalam kesempatan kunjungan singkat tersebut, penulis mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga terkait dengan Sarajevo, yaitu kekuatan wakaf yang menjadi penopang berdirinya ibukota di negeri Balkan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sarajevo adalah contoh kota yang pada awalnya didirikan dengan basis pemanfaatan aset wakaf. Adalah Gazi Husrev-Beg (1480-1541) yang pada saat itu ditunjuk oleh kekhalifahan Turki Usmani untuk menjadi gubernur Bosnia, yang pertama kali mengembangkan kota Sarajevo sehingga kota tersebut muncul menjadi tempat strategis yang berada diantara Istanbul dan Roma.

Sejak ditunjuk sebagai gubernur oleh Sultan Sulaiman I pada tanggal 15 September 1521, Gazi Husrev-Beg berupaya untuk menjadikan Bosnia sebagai gerbang untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh ajaran Islam di wilayah Balkan, sekaligus menjadikannya sebagai pusat peradaban Islam di Eropa Timur. Kemudian, beliau membangun Sarajevo dengan memanfaatkan

tanah yang diwakafkannya. Pemanfaatan wakaf tersebut dilakukan untuk tiga keperluan. Pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan keummatan dan kenegaraan. Masjid yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Gazi Husrev-Beg ini dibangun sekitar tahun 1530an.

Kedua, ia membangun madrasah, perpustakaan dan fasilitas umum seperti toilet dan kamar mandi umum. Madrasah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan dasar dan menengah di Sarajevo, dan mendorong lahirnya Sarajevo University hingga saat ini. Adapun perpustakaan saat ini memiliki koleksi manuskrip Islam yang termasuk terbanyak di dunia. Sekolah dan perpustakaan ini dibangun sekitar tahun 1537.

Ketiga, ia membangun pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, melengkapi masjid dan pusat pendidikan. Hingga saat ini, pasar tersebut masih beroperasi di kawasan yang dikenal dengan nama Old Town of Sarajevo. Ketiga fasilitas tersebut dibangun di atas aset yang diwakafkannya, sehingga tidak dapat dibayangkan betapa dahsyatnya aliran pahala kepadanya hingga saat ini. Tidaklah mengherankan jika di zaman beliau, Sarajevo berkembang menjadi salah satu kota penting di Eropa, yang berada di bawah kendali

Turki Usmani.

Srajevo, dalam pandangan penulis, dapat dijadikan sebagai salah satu bukti bahwa ketika aset wakaf dikelola secara produktif dan profesional, maka jejaknya akan bertahan lama. Untuk itu, belajar dari sejarah Sarajevo, penulis melihat bahwa sekaranglah momentum yang tepat untuk mengembangkan wakaf, termasuk wakaf produktif. Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan, agar lahan wakaf yang jumlahnya empat ribu kilometer persegi di tanah air ini dapat dioptimalkan bagi kemajuan bangsa.

Pertama, perlunya sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang urgensi memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan bersama dengan cara-cara yang kreatif dan produktif. Banyaknya tanah wakaf yang menganggur seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat edukasi publik ini. Termasuk di dalamnya adalah wakaf uang yang jumlahnya secara nasional sampai saat ini masih kurang dari Rp 200 miliar. Padahal potensi wakaf uang ini diyakini akan lebih besar dari potensi zakat yang mencapai angka Rp 217 triliun.

Kedua, pentingnya penguatan kelembagaan nadzir, termasuk BWI (Badan Wakaf Indonesia), sebagai ujung tombak pengelolaan wakaf. Penguatan ini antara lain terkait de-

ngan infrastruktur kelembagaan, kualitas SDM nadzir yang ada, dukungan teknologi informasi, dan tata kelola wakaf (*waqf governance*). Tanpa upaya dan kesungguhan untuk meningkatkan kualitas nadzir, maka upaya optimalisasi aset wakaf ini akan mengalami kesulitan.

Ketiga, perlunya penguatan dukungan dan regulasi pemerintah dan parlemen (DPR) terhadap pengembangan wakaf. Sarajevo adalah contoh nyata bagaimana kepedulian dan komitmen penguasa, dalam hal ini Gubernur Gazi Husrev-Beg, ternyata mampu menjadikan wakaf sebagai sumber yang menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, wakaf juga berperan dalam pembangunan SDM yang dimiliki oleh negara. Tentu kita berharap agar pemerintahan sekarang, bersama-sama dengan DPR, dapat mendorong penguatan peran instrumen wakaf ini dalam pembangunan nasional.

Keempat, inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan International Working Group on Waqf Core Principles (IWG WCP) yang digagas Bank Indonesia, IDB dan BWI harus kita dukung secara penuh. Diharapkan, forum tersebut dapat menjadi media untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, baik pada level nasional maupun internasional. *Wallaahu a'lam.*

# PEMBIAYAAN BAGI HASIL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PETAMBAK UDANG

OKY LUKMANSYAH/ANTARA



**Shofiyanto**  
Mahasiswa S1  
Ekonomi Syariah FEM  
IPB



**Dr Muhammad Findi A**  
Sekretaris Pusat Studi  
Bisnis dan Ekonomi  
Syariah (CIBEST) IPB



**Salahuddin El Ayyubi**  
Sekretaris Prodi  
Ekonomi Syariah

Perikanan merupakan sektor yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumberdaya lautnya. Salah satu faktor penting yang dibutuhkan pelaku usaha perikanan guna mendukung berkembangnya sektor ini adalah permodalan. Karakteristik pelaku usaha perikanan yang masih miskin tentu menjadi penghambat dalam mendapatkan akses permodalan yang tepat. Oleh karena itu diperlukan model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perikanan.

Pembiayaan dengan skim bagi hasil yang sesuai syariah merupakan salah satu model yang tepat bagi pelaku usaha perikanan ini. Skim bagi hasil menawarkan skema yang lebih adil bagi pelaku usaha perikanan karena adanya pembagian keuntungan risiko dan keuntungan yang disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan bagi hasil terhadap pengentasan kemiskinan petambak udang di Kabupaten Tulang Bawang.

## Metode dan hasil penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus kepada para petani tambak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Program X (nama asli program sesuai permintaan tidak ditampilkan) yang beroperasi di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan mempertimbangkan bahwa Program X merupakan program pembiayaan perikanan tambak udang yang menggunakan skim bagi hasil yang sesuai syariah.

Untuk mengukur dampak pembiayaan digunakan indeks-indeks kemiskinan, yaitu *headcount ratio*, *poverty gap index* (P1), *income gap index* (I), dan *Sen index* (P2). Data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara kepada informan dari Program X sebanyak 5 orang dan responden yang terdiri dari 100 petani tambak yang menjadi anggota Program X.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembiayaan yang dikelola oleh Program X sudah tergolong efektif, namun ada beberapa hal yang perlu dikoreksi yaitu jangka waktu pengembalian yang kurang longgar, loyalitas anggota yang kurang optimal, serta belum adanya dampak pembiayaan bagi kondisi usaha petani tambak sebagai akibat dari kegagalan budi daya petambak yang menjadi anggota kemitraan. Adapun dampak dari sisi kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, nilai *headcount ratio* sebelum menjadi anggota kemitraan adalah sebesar 0.08 yang artinya dari seluruh rumah tangga hanya terda-



TABEL 1 INDIKATOR KEMISKINAN

INDIKATOR KEMISKINAN	SEBELUM MENJADI ANGGOTA KEMITRAAN	SESUDAH MENJADI ANGGOTA KEMITRAAN	PERSENTASE PERUBAHAN (%)
H	0.08	0.33	10.25
P1 (rupiah)	206 539	417 099	67.53
I	0.19	0.38	10.70
P2	0.04	0.21	4.47

pat 8 persen keluarga yang tergolong miskin. Pada saat menjadi anggota kemitraan, nilai *headcount ratio* justru meningkat dari 0.08 menjadi 0.33. Demikian pula dengan nilai indeks *poverty gap* atau kesenjangan kemiskinan, yang mengalami kenaikan dari Rp 206.539,00 menjadi Rp 417.099,00. Hal yang sama juga terjadi pada indeks kesenjangan pendapatan dimana indeks tersebut naik dari 0.19 menjadi 0.38 setelah menjadi anggota kemitraan.

Nilai indeks Sen juga justru meningkat dari 0.04 menjadi 0.21 setelah petani tambak menjadi anggota kemitraan. Secara umum, angka kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan justru mengalami peningkatan pasca Program X.

## Penyebab kemiskinan

Pertanyaannya, apa yang membuat tingkat kemiskinan ini meningkat? Penyebabnya adalah penurunan hasil budi daya udang anggota Program X. Sementara berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan, penurunan itu sendiri disebabkan oleh 4 faktor, yaitu faktor alam (pergantian musim,

keadaan lingkungan perairan, dan penyakit udang yang sedang mewabah), faktor teknis (keterbatasan sarana dan prasarana budi daya tambak udang serta keterbatasan pengetahuan petani tambak udang), faktor *moral hazard* dari anggota sendiri, serta harga udang yang sedang menurun tajam di pasar domestik.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kegagalan budi daya anggota Program X selama beberapa periode terakhir disebabkan oleh 4 faktor, yaitu faktor alam lingkungan, teknis (sarana, prasarana, serta pengetahuan petani tambak yang terbatas), faktor *moral hazard* dari anggota kemitraan sendiri, dan penurunan harga udang *vaname* di pasar domestik.

Kegagalan budi daya udang ini menyebabkan pendapatan petani tambak menjadi turun. Penurunan pendapatan ini lalu menyebabkan jumlah petani miskin, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan petani tambak meningkat sebagaimana penilaian terhadap perubahan indikator-indikator kemiskinan. Peningkatan kemiskinan ini juga mengimplikasikan bahwa mayoritas petani tambak hanya mengandalkan budi daya udang sebagai mata pencaharian utamanya sehingga penurunan hasil budi

daya udang akan berpengaruh langsung pada tingkat kemiskinannya.

Di sisi lain, kegagalan budi daya anggota kemitraan juga menyebabkan pembiayaan yang dikelola menjadi bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini berimplikasi pada penurunan kemampuan Program X dalam memberikan permodalan bagi anggotanya. Pada akhirnya penurunan permodalan yang diberikan juga berimplikasi pada penurunan pendapatan petani tambak udang.

Untuk mengatasinya, maka diperlukan sejumlah langkah strategis. Ya itu, program X hendaknya lebih selektif dalam memilih mitra ahlinya, baik dari segi teknis maupun dari segi moral, dan diperlukan upaya untuk mengatur mekanisme pengawasan terhadap anggota kemitraan sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap budi daya udang kepada mitra ahli secara rutin sehingga budi daya udang yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan SOP yang ada. Juga perlu dilakukan pembinaan agama terhadap mitra ahli sehingga dapat menjaga moralitasnya dari perilaku yang menyimpang dan curang. *Wallaahu a'lam.* ■

## BUKAN TAFSIR

# Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**Dr M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung 25-27 September tahun ini telah melahirkan kesepakatan baru tentang tujuan pembangunan global yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan komitmen lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang akan berakhir Desember 2015.

Dibandingkan MDGs, cakupan tujuan dalam SDGs lebih luas. Jika MDGs hanya terdiri 8 tujuan kesejahteraan, SDGs memiliki 17 tujuan (dengan 169 target/sasaran) untuk dicapai dalam 15 tahun mendatang (2030). Keseluruhan tujuan SDGs mencakup 3 dimensi tujuan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. MDGs, di sisi lain dinilai banyak kalangan lebih mengedepankan aspek sosial-ekonomi (7 item) dibanding satu tujuan terkait lingkungan.

Secara ringkas, ke-17 SDGs tersebut adalah sebagai berikut: (1) mengurangi segala bentuk kemiskinan; (2) mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan; (3) menjamin kesehatan yang baik dan kesejahteraan inklusif; (4) menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi; (7) ketersediaan energi bersih dan terjangkau; (8) pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang layak; (9) membangun industri, inovasi dan infrastruktur yang inklusif; (10) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; (11) menjamin kota yang berkelanjutan dan inklusif; (12) menjamin pola konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab; (13) memerangi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya; (14) melestarikan kehidupan di bawah laut (samudera) secara berkelanjutan; (15) melindungi, mengembalikan keberlanjutan eko-

sistem darat; (16) mendorong masyarakat yang damai dan inklusif; (17) kemitraan dalam mencapai tujuan (lihat <http://www.globalgoals.org/>).

Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi golongan tertentu tapi juga memperhatikan keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lain. Adapun keadilan berarti pencapaian pembangunan di satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya. Kalau hal ini terjadi, niscaya hasil pembangunan akan lebih berkualitas dan lebih dirasakan secara nyata.

Lalu bagaimanakah hubungan antara agama dan SDGs. Etika agama diharapkan berperan untuk menuntun cara pandang, sikap, dan aksi umatnya merespon tren dunia ke depan. Sebenarnya agak kurang tepat pengertian bahwa umat beragama harus merubah cara pandangnya merespon tren pembangunan, karena sebenarnya apa yang hendak dicapai dalam SDGs juga bersesuaian dengan karakter dan tujuan ajaran agama. Dalam artian, perspektif agama akan sangat sejalan dengan perwujudan dunia yang sejahtera, aman, berkeadilan dan berkeadaban.

Dunia memang cepat berubah. Dalam konteks sejarah peradaban, perubahan dunia terjadi secara signifikan pada zaman umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini diakui Nabi SAW sendiri yang dalam satu riwayat menyatakan bahwa sebagian keistimewaan umat beliau daripada umat para nabi sebelumnya adalah bahwa umat beliau diberi 'kunci-kunci perbendaharaan bumi' (HR Bukhari-Muslim, lihat *Mukhtârul Ahâdits* no. 190).

Dengan kata lain, perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, kelembagaan dan perdagangan menyebabkan eksploitasi kekayaan alam terjadi secara lebih masif, terutama pasca revolusi industri, hingga saat ini. Hal ini merupakan sesuatu yang belum Allah turunkan bagi umat-umat Nabi sebelumnya.

Kemajuan peradaban memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak pada meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebar ketimpangan pendapatan yang dicirikan dengan semakin dominannya kaum kapitalis. Ekonom Jeffrey Sachs mengungkapkan kalau dulu orang relatif 'merata' dalam kondisi pendapatan yang rendah (kemiskinan), saat ini peningkatan *income* suatu perekonomian selalu dibarengi dengan ketimpangan yang semakin menganga karena kue ekonomi sebagian besar hanya dirasakan oleh sekelompok orang saja.

Aspek *inequality* inilah yang merupakan *unfinished business* (belum berhasil dicapai) dalam periode MDGs. Banyak pihak menilai bahwa MDGs secara umum baru berhasil pada level mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) belum sampai level mengurangi ketimpangan dan pemihakan terhadap lingkungan.

Selanjutnya, perubahan iklim juga merupakan tantangan besar masyarakat dunia. Kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) secara yakin menyatakan bahwa aktifitas manusia merupakan faktor utama kenaikan suhu global yang tak lain disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO<sub>2</sub> (dan emisi rumah kaca lainnya), terutama penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga.

Agama mensyariatkan bahwa pengembangan dan penjagaan alam semesta adalah keharusan, bukan pilihan. Hal inilah yang harus dijawab oleh umat dengan menjadi aktivis yang bertanggung jawab demi kesejahteraan, keadilan dan sustainabilitas. Kalau umat Nabi Muhammad SAW sudah diberi kemampuan membuka 'kunci-kunci' alam semesta, tentu saja tanggung jawab mereka juga untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Sebagai umat akhir zaman, kita adalah generasi awal dimana faktanya alam telah mengalami kerusakan yang masif yang diakibatkan tangan-tangan manusia, dan boleh jadi kitalah generasi terakhir yang benar-benar bisa memperbaiki dan mengubahnya. Ajaran agama menuntun kita untuk semakin aktif melihat pentingnya aspek sosial, kesinambungan, dan dukungan lingkungan untuk keberlangsungan peradaban. Kesadaran untuk hidup tidak egois dan memperhatikan generasi penerus.

Suatu hadits menyatakan: *'Sesungguhnya dunia itu lahan yang manis lagi hijau. Sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian'* (HR Muslim). Hadits lain menyatakan: *'Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya'* (HR Bukhari).

Sebagai khalifah, kita yang masih hidup diperkenankan memanfaatkan alam namun di saat yang sama kita juga dibebani tanggung jawab untuk merawatnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengarahkan kita bertindak menuju kesejahteraan, adapun nilai keimanan dan kemanusiaan 'memaksa' kita hanya melakukan hal-hal yang digariskan-Nya. ■